

BAB III

KRONOLOGI PEMBUATAN PERJANJIAN CMATS

A. Negosiasi Timor Leste dan Australia

Setiap Negara merdeka, berhak untuk menentukan letak geografis dan batas-batas darat, laut dan udara pada Negara tersebut. Begitu juga dengan Negara Timor Leste setelah merdeka, berhak menentukan letak geografis dan batas-batas Negara. Oleh sebab itu perlu adanya negosiasi dengan Negara tetangga. Timor Leste sendiri negaranya berbatasan dengan Negara Indonesia dan Negara Australia. Ada kesepakatan tentang batas yang jelas dengan Negara-negara tetangganya seperti Australia dan Indonesia. Setiap Negara hendaknya menyelesaikan perbatasan melalui negosiasi-negosiasi dan mekanisme legal yang diterima secara internasional.¹

Definisi negosiasi sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses tawar menawar dengan jalan berunding untuk memberi atau menerima guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak dengan pihak lain.

Menurut Timor Leste sebagai sebuah Negara yang baru merdeka, penyelesaian mengenai batas negaranya merupakan sebuah implementasi nilai-nilai perjuangan untuk kemerdekaanya. Dalam penyelesaian batas-batas Negara

¹ Australia Menghambat Batas Negara, Buletin Lao Hamutuk, vol 4, no 3-4 Agustus 2003, hal 11.

<http://www.etan.org/lh/pdfs/bulletin/lhbl4n34bh.pdf>

termasuk ke dalam sebuah kepentingan nasional untuk menjaga dan melindungi kedaulatan bangsa. Dengan adanya batas negara, negara tersebut bisa memiliki aturan hukum yang mengatur tentang perairan laut dan darat serta bisa melindungi hak negara dalam memanfaatkan dan menggunakan kekayaan sumber daya alam maupun menjaga dan melindungi lingkungan hidup.²

Sejak Timor Leste merdeka pemerintah Australia telah menolak untuk membicarakan mengenai perbatasan laut antara Timor Leste dan Australia. Pada bulan Maret 2002 sebelum kesepakatan laut Timor resmi ditandatangani, Australia keluar atau menarik diri dari aturan-aturan Mahkamah *International Court of Justice* (ICJ) dan Pengadilan Konvensi Hukum Laut PBB, UNCLOS untuk arbitrase imparial mengenai batas-batas laut. Dengan keluarnya Australia Hal ini akhirnya mempersulit Timor Leste dalam menggunakan Hukum Internasional untuk menyelesaikan sengketa batas laut jika negosiasi yang dilakukan mengalami kegagalan.

Timor Leste memulai perundingan dengan Australia untuk mendapatkan kesepakatan dalam pembagian sumber daya alam di celah timor. pemerintah Timor Leste mengusulkan untuk memulai negosiasi. Australia menunda tanggapannya hingga kedua Negara tersebut telah meratifikasi perjanjian Laut Timor sementara dan menandatangani sebuah perjanjian.

Perundingan pertama antara Timor Leste dan Australia untuk siding penjajakan yang membahas mengenai perbatasan laut diadakan di Darwin pada tanggal 12 November 2003. Timor Leste membuat sebuah usulan agar pertemuan

² Australia Mengahambat Batas Negara, Buletin Lao Hamutuk, vol 4, no 3-4 Agustus 2003, hal 11.

<http://www.etan.org/lh/pdfs/bulletin/lhbl4n34bh.pdf>

diadakan setiap bulan sekali sehingga permasalahan perbatasan lebih cepat diselesaikan, tetapi Australia menolak dan hanya mau mengadakan pertemuan setiap enam bulan sekali. Dengan alasan bahwa mereka tidak mempunyai cukup uang dan wakil untuk sering kali membahas persoalan batas perairan itu.³ Pemerintah Timor Leste mengungkapkan ketidaksukaannya setelah perundingan ini.

Negara Australia tetap menolak untuk melakukan negosiasi, Australia memberikan tanggapan bahwa butuh proses untuk menentukan batas perairan Laut Timor yang berbatasan dengan Negara mereka. Namun Negara Timor Leste tetap menentang, mereka melakukan kampanye agar Negara Australia segera untuk melakukan perundingan kembali. Perdana Menteri Timor Leste sendiri yaitu Mari Alkatiri meminta kepada Negara Australia untuk menahan diri melakukan eksplorasi sumber daya minyak dan gas, dilaut perbatasan yang di persengketakan, Timor Leste pun mendesak Australia agar segera menentukan jadwal negosiasi dalam penentuan batas perairan.

Dengan adanya desakan yang dilakukan oleh Timor Leste, pemerintah Australia memberikan tanggapan yang mana bahwa dalam menentukan batas perairan Laut Timor memerlukan waktu yang panjang dan kompleks. Pemerintah Australia tidak berpikiri bahwa Australia pantas dalam menentukan proses akhir tersebut, dan Australia juga tidak berencana untuk melakukan peninjauan ulang terhadap keputusan mereka pada bulan Maret 2002 silam. Karena Australia sendiri sudah tidak menerima lagi yuridiksi dari pengadilan keadilan internasional (ICJ) dan juga maupun dari mekanisme penyelesaian perselisihan lainnya.

³ Pembatasan Batas Perairan Berjalan Lamban, Buletin Lao Hamutuk, vol 5, no 3 Maret 2004, hal 5,
<https://www.laohamutuk.org/OilWeb/Bahasa/LHB52BI.htm>

Perundingan yang kedua diadakan di ibukota Timor Leste, Dili. Perundingan kedua berlangsung pada tanggal 19 sampai 22 April 2004. Perundingan kedua ini membahas mengenai batas laut kedua negara dan kepemilikan kekayaan miliaran dollar dari penghasilan minyak dan gas lepas pantai. Pada perundingan ini Australia ingin bahwa batas laut kedua negara masih tetap seperti dulu, dimana mengikuti persetujuannya dengan Indonesia saat Timor Leste masih menjadi bagian Negara itu. Apabila Timor Leste setuju dengan yang diinginkan oleh Australia secara tidak langsung maka Australia akan mendapatkan kekayaan miliaran dollar dalam pembagian sumber minyak dan gas. Dalam perundingan kedua ini tidak banyak kesepakatan yang terjadi antara kedua negara melainkan hanya sedikit.

Pihak Timor Leste dari team perundingnya sedikit merasakan ketakutan karena perundingan antara Timor Leste dan Australia akan berjalan lambat hingga membutuhkan waktu sampai 10 tahun. Pihak Timor Leste mempunyai harapan supaya batas laut tidak lebih dekat daripada garis tengah diantara kedua negara. Adapun Perdana Menteri Timor Leste telah memperingatkan pemerintahannya yang akan mengambil keputusan dalam menyetujui ratifikasi kesepakatan kerjasama mengeksploitasi ladang minyak *Greater Sunrise* jika Australia tidak melakukan kerjasama dengan kepercayaan yang baik.

Perbatasan antara Timor Leste dan Australia yang berada diantara garis tengah kedua negara akan memberikan penghasilan untuk Timor Leste tiga kali lipat dari yang dihasilkan oleh ladang minyak dan gas. Karena Australia menolak untuk mengadakan perundingan lebih dari dua kali setahun bagi perundingan bilateral untuk menentukan batas perairan permanen. Menurut pemerintah Australia, kesepakatan ini akan menghasilkan 7 miliar dollar bagi Timor Leste, dibandingkan dengan 1 miliar yang menjadi pemasukan bagi Australia. Australia tidak akan menyerah untuk

menetapkan ladang Greater Sunrise hanya karena Timor Leste sekarang menginginkan lebih banyak.⁴

Perdana Menteri Timor Leste, Mari Alkatiri menyatakan :

*“Batas laut yang adil akan memberikan Timor Leste lebih banyak penerimaan minyak yang akan digunakan untuk kesehatan dan pendidikan anak-anak di Timor Leste. Kami bersepakat dengan negara demokrasi itu, mencoba dimana-mana untuk belajar, untuk memperlihatkan negara lain dan dunia dalam aturan hukum dan kami berharap Australia dapat menjadi contohnya”.*⁵

Timor Leste mengadakan konferensi pers agar negosiasi berikutnya cepat dilaksanakan, kemudian Timor Leste sendiri meminta pembagian dengan seadilnya. Timor Leste meminta agar perbatasan laut Timor dan Laut di Australia ditetapkan garis batas median line diantara dua Negara, yang sesuai dengan Hukum Internasional.

Di Konferensi pers Menteri Luar Australia, Alexander Downer menolak komplain yang dilakukan pemerintah Timor Leste sebagai hal tidak lebih dari taktik negosiasi :

“Mereka melihat dengan taktik itu berguna sebagai jalan untuk memperkuat negosiasi dari menuduh kami sebagai negara yang nakal dan agresif. Kami hanya mendengarkan sekarang dan kami sama sekali tenang dan pantas, hanya mendengarkan apa yang mereka bisa dan kami akan berpartisipasi diproses negosiasi, demikian yang menurut kami yang terbaik. Kami

⁴ The Australian, 20 April 2004, www.timorseaoffice.gov.tp

⁵ ABC News Online, Tuesday 20 April 2004

*harus memperoleh yang sewajarnya dengan jalan negosiasi, dimana bukan publik yang menjadi pokoknya. Mereka lebih dari umum, mereka seperti itu untuk mempublikasikan negosiasi. Kami adalah orang-orang yang mengadakan negosiasi secara privat”.*⁶

Pada saat perundingan PM Timor Leste, Mari Alkatiri mengaskan kepada Australia agar menyerahkan lisensi untuk mengeksplorasi wilayah yang meliputi bagian *Greater Sunrise*. Dia juga mengatakan bahwa timbulnya masalah perbatasan adalah soal hidup dan mati. Kemudian Timor Leste dan Australia kembali melakukan perundingan. Australia berharap bisa menyelesaikan negosiasi dengan Timor Leste terkait hasil minyak dan gas maupun penyelesaian batas Laut Timor pada akhir tahun 2004.

Pada tanggal 27 Oktober 2004 Timor Leste mengadakan perundingan putaran ketiga dengan Australia di Dili. Negosiasi ini berlangsung dalam kondisi yang tidak nyaman. Akibatnya negosiator dari Australia malah melakukan pemogokan, yang mana mereka merasa bingung dan kecewa karena Timor Leste menolak kesepakatan kompromi dalam persetujuan batas laut.

Dough Chester, selaku Sekretaris Jendral Menteri Luar Negeri Australia dan Kepala Delegasi Canberra di Dili menyatakan :

“mengubah strategi negosiasi sejak perundingan bulan September lalu semakin jauh dari kesepakatan. Kami sekarang menunggu ide baru dari Timor Leste. Kami kecewa dan berpikir akan kehilangan semua kesempatan. Perundingan menjadi jauh dari harapan,

⁶ BBC World Service, Tuesday 20 April 2004

*Timor Leste tidak mempersiapkan diri untuk membicarakan garis perbatasan. Ini kejutan buat kami dan hidup kami menjadi menyedihkan”.*⁷

Dengan terhentinya perundingan. Perdana Menteri Timor Leste, Mari Alkatiri mengungkapkan bahwa dirinya shock karena Australia menarik diri dari negosiasi. Timor Leste akan mendapatkan miliaran dalam tambahan pendapatan pajak untuk menjadi 3 miliar dollar AS jika menanggukkan tuntutan Batas lautnya selama 10 tahun, tetapi Timor Leste menolak tawaran itu, dimana akan mendapatkan hampir separuh dari kira-kira 10 miliar Dollar AS royalty minyak dan gas dari proyek Greater Sunrise. Dibawah persetujuan itu, juga akan mendapatkan kurang dari 20 persen dari pemasukan. Timor Leste juga menuntut 3 miliar dollar AS dari rencana pengolahan dan manfaat pipa saluran gas di Greater Sunrise untuk dikembangkan dinegaranya, daripada di Darwin, lokasi yang dipilih Australia. Karena Timor Leste merasa ada ketidakberesan keuntungan dari rencana pengolahan yang diperkirakan sampai lebih dari 20 miliar dollar AS selama 30 Tahun.

Timor Leste, karena merasa perundingan yang dilakukan tidak berpihak kepada mereka akhirnya membatalkan kembali hasil negosiasi yang telah dibuat dengan Australia. Karena Timor Leste mengundur kembali masalah negosiasi, pihak Australia yang kembali merasa kecewa. Australia kembali menawarkan lebih 4 miliar Dollar AS untuk Timor Leste agar setuju untuk menanggukkan tuntutannya mengenai batas laut di antara kedua Negara. Kesepakatan untuk membagi pendapatan dari Greater Sunrise sebesar 50:50 bahkan 80:20 bagi Australia.

⁷ www.timorseaoffice.gov.tp

Perdana Menteri Timor Leste, Mari alkatiri menyatakan kepada Australia bahwa perundingan bisa saja terhenti tanpa ada kesempatan untuk membagi hasil minyak dan gas di Celah Timor :

*“Kami membicarakan tentang partisipasi Timor Leste di pengembangan semua sumber daya alam, tapi sebaliknya mereka merundingkan tentang uang. Apa delegasi Australia berniat menawarkan dan mengeksplorasi dengan tidak mengakui kedaulatan kami di wilayah itu”.*⁸

Timor Leste menginginkan perbatasan laut berada ditengah antara kedua negara dimana Timor Gap hanya berjarak 150 kilometer persegi (90 mil) dari pantai Timor Leste. Pada Tanggal 7 Maret 2005 Timor Leste dan Australia kembali melakukan negosiasi yang dilakukan di Canberra. Delegasi dari Australia mengungkapkan bahwa Australia mengklaim pemerintah Australia menolak untuk tunduk dan oatah pada prinsip-prinsip Hukum Internasional.

Australia memberikan sebuah penawaran kepada Timor Leste yaitu, Australia siap memberikan 3-5 miliar dollar AS sebagai bentuk pembayaran atas *Greater Sunrise*, jika Timor Leste mau menunda kedaulatannya atas Celah Timor yang diperkirakan bernilai 41 miliar dollar AS. Dengan adanya tawaran tersebut, Australia sangat berharap jika Timor Leste mau menunda kedaulatannya dan menanggukuhkan tuntutan batas lautnya selama 100 tahun.

Pada bulan April 2005 kedua Negara kembali mengadakan sebuah negosiasi putaran ke lima. Para

⁸ Lao Hamutuk, Pembahasan Batas Perjanjian Berjalan Lambat, Vol 5, No 3, Maret 2004, hal 5.

<https://www.laohamutuk.org/OilWeb/Bahasa/LHB52BI.htm>

perundingan ini pemerintah Timor Leste menyatakan bahwa kedua negara hampir mencapai kesepakatan untuk membuka ‘‘harta karun’’ diwilayah Celah Timor, ada beberapa detail yang masih menjadikan mereka untuk membuat negosiasi ulang. Menteri Australia, Alexander Downer menyatakan bahwa Timor Leste akan mendapatkan miliaran dollar sebagai hasil dari pendapatan tambahan yang tergantung pada harga jual minyak dan gas. Timor Leste dan Australia akan mengatur semuanya yang berkaitan dengan pendapatan minyak dan gas yang mempunyai nilai miliarin dollar tersebut.

Persetujuan itu akan menjamin Timor Leste puluhan miliar dollar AS dan dipotong dengan pengolahan dari eksplorasi di Laut Timor. Sebaliknya Timor Leste setuju untuk menunda tuntutanannya atas batas laut Timor. Di dalam kesepakatan ini membuta Timor Leste akan mendapatkan pendapatan dari ladang Greater Sunrise meningkat menjadi 5 miliar dollar AS. Australia mengambil keputusan untuk menaikkan nilai tawaran sebagai kompensasi terhadap Timor Leste yang mana telah bersedia atas ditanggungkannya penyelesaian batas laut dan hasil minyak dan gas. Berakhirnya perundingan yang berlangsung di Dili ini ditandai dengan disetujuinya rancangan kerja, yang akan dibicarakan secara mendetail pada negosiasi di Sydney pada bulan Mei 2005.

Hasil dari perundingan pada Mei Tahun 2005 tersebut adalah, kedua Negara setuju untuk menanggungkan pembicaraan mengenai pengaturan batas laut Timor hingga beberapa puluh tahun, dan Timor Leste akan berbagi hasil yang besar dari pendapatan ladang minyak dan gas.

Adapun perundingan pada tanggal 11-13 Mei 2005 ini bertujuan untuk memperpanjang daftar dan membicarakan lebar perbatasan laut dari kedua Negara. Dalam garis besarnya Timor Leste akan menerima pendapatan dari ladang minyak, agar memberikan hasil pengeksplorasian yang lebih banyak dari *Greates Sunrise* yang semula menerima tawaran sebanyak 2 miliar dollar AS menjadi 5 miliar Dollar AS yang berarti

Timor Leste mendapatkan pemasukan yang semula 20 % dari *Greater Sunrise* meningkat menjadi 50%.

Menteri Luar Negeri Timor Leste, Jose Ramos Horta menyatakan bahwa pemerintah Timor Leste akan menyetujui permintaan Australia untuk menanggukkan tuntutannya atas batas laut selama 50 tahun. Topik utama dari perundingan ini membahas tentang wilayah perbatasan antara kedua negara. Draf kesepakatan dari perundingan negosiasi di Sydney ini adapun meliputi dalam berbagi penghasilan minyak dan gas di ladang *Greater Sunrise*, dan sekaligus menunda untuk membicarakan mengenai penentuan batas Laut Timor selama 50 tahun.

Konsesi sama artinya dengan sesuatu yang diberikan, khususnya setelah perundingan. Janji akan imbalan adalah dalam bujukan yang menawarkan suatu bentuk keuntungan di kemudian hari sebagai pengganti persetujuan. Mengenai masalah tertentu yang dinegosiasikan. Konsesi diberikan untuk memperoleh persetujuan atau adanya suatu perubahan pada pihak lain. Australia memberikan konsesi berupa sejumlah dana agar Timor Leste menunda tuntutannya mengenai batas laut Timor selama 50 tahun. Berdasarkan kesepakatan, Timor Leste akan mendapat pendapatan dari dua proyek di laut Timor. Untuk proyek *Greater Sunrise*, Negara yang baru merdeka ini mendapat tambahan pendapatan sebanyak 5 miliar dollar AS. Artinya mereka total mendapat 10 miliar dollar AS bila ditambah dengan pembagian sebelumnya. Selain itu, Timor Leste juga berhak mendapat 15 miliar dollar dari proyek joint Petroleum Development Area (JPDA) yang sudah berjalan lebih dahulu. Dengan tercapainya kesepakatan ini, kedua Negara sepakat untuk menanggukkan perselisihan mengenai garis perbatasan di Laut Timor serta membiarkan proyek *Greater Sunrise* berjalan.⁹

⁹ www.batampos.com, jumat, 13 Januari 2006

Kedua belah pihak akhirnya menyelesaikan Perjanjian CMATS pada bulan November 2005, setelah satu putaran yang terdiri dari beberapa perundingan selama dua tahun, dan menandatangani di Sydney pada tanggal 12 Januari 2006. Perjanjian ini menyelesaikan satu sengketa yang berlangsung lama antara kedua pemerintah, setidaknya untuk 50 tahun mendatang.

B. Perjanjian CMATS

Dalam hubungan antara satu negara dengan negara lainnya terdapat sebuah perjanjian yang biasanya dibuat oleh negara tersebut untuk mencapai sebuah kesepakatan bersama. Seperti halnya hubungan antara Timor Leste dan Australia, yang pada tahun 2006 silam membuat sebuah perjanjian. Pemerintah Timor Leste dan Australia menandatangani sebuah perjanjian yang dibuat untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi ladang-ladang minyak dan gas yang ada di Laut Timor dan berada di luar wilayah Joint Petroleum Development Area (JPDA – Wilayah Pengembangan Minyak Bersama).

Perjanjian antara Timor Leste dan Australia ini yaitu perjanjian CMATS. Perjanjian ini dibuat setelah melalui proses diplomatis yang sudah berlangsung lama, yaitu lebih dari 30 tahun. Kemudian perjanjian ini berlaku hingga dengan 50 tahun lagi. Perjanjian yang membahas tentang Ketentuan Laut di Laut Timor ini (Treaty on Certain Maritime Arrangements in the Timor Sea – CMATS), atau yang sering disebut “Perjanjian Sunrise,” di Timor Leste. Perjanjian ini membagi penghasilan sumber minyak dan gas dari wilayah ladang-ladang tambang yang sebelumnya disengketakan. Namun perjanjian ini sekaligus menunda dalam memutuskan negara mana yang memiliki wilayah laut dan dasar laut yang mana. Dengan belum adanya kepemilikan yang jelas mengenai wilayah dan batas antara kedua negara ini, membuat memungkinkan bagi perusahaan-perusahaan internasional terus

bergerak maju dengan proyek-proyek minyak dan gas, dan akan memberikan penghasilan tambahan kepada kedua negara. Meskipun tetap mendapatkan penghasilan dari perusahaan yang mengelolanya, tetap saja tidak menyelesaikan persoalan mendasar mengenai perbatasan laut antara kedua negara.

Timor-Leste dan Australia mendapatkan hasil masing-masing setengah dari penghasilan hulu di ladang *Greater Sunrise* yang besar, yang mana *Greater Sunrise* dua kali lebih dekat ke Timor-Leste daripada Australia. Australia mendapatkan penghasilan yang lebih banyak dari pada Timor Leste, seperti hasil dari semua yang dikeluarkan dari wilayah-wilayah lain di Laut Timor sebelah selatan perbatasan dasar laut Australia-Indonesia 1972 dan di dari luar area JPDA padahal wilayah tersebut jika dilihat lebih dekat ke Timor-Leste, meliputi Laminaria-Corallina, Buffalo, dan wilayah-wilayah lain yang sedang diesplorasi sekarang atau di masa mendatang. Sebelum Perjanjian CMATS, Timor-Leste sudah melakukan protes atas pengembangan Australia atas wilayah-wilayah ini, yang seharusnya menjadi milik Timor-Leste berdasarkan asas hukum internasional yang berlaku sekarang.

Perjanjian CMATS ini dibuat dengan berisikan dua belas pasal, dua lampiran, dan dua surat penjelasan. Perjanjian ini mengubah isi dari Perjanjian Laut Timor yang dibuat pada tahun 2002 dan Kesepakatan Penyatuan Internasional (IUA) Sunrise yang ditandatangani pada tahun 2003 tetapi belum diratifikasi. Berikut ini adalah sebagian dari isi paling penting perjanjian ini,

1. **Tanpa perbatasan laut:** Pasal 2 CMATS mengatakan bahwa perjanjian ini tidak mengubah posisi kedua negara mengenai perbatasan laut atau klaim wilayah, mengesampingkan pembahasan mengenai klaim mereka yang bertentangan selama perjanjian ini berlaku. Perjanjian CMATS juga berkali-kali telah menyebutkan bahwa tidak satu pihak pun akan menuntut hak kedaulatan (pasal 4.1), membahas perbatasan laut (pasal 4.6 dan 4.7) atau terlibat dalam

proses hukum yang berkaitan dengan perbatasan laut atau yurisdiksi teritorial (pasal 4.4 dan 4.5).¹⁰

2. **Jangka waktu:** Pada pasal 12 membahas bahwa perjanjian CMATS berlaku untuk 50 tahun sesudah ratifikasi dan pemberlakuannya, walaupun ini bisa lebih pendek jika produksi Sunrise tidak dimulai dalam waktu 10 tahun atau berakhir kurang dari 45 tahun setelah perjanjian CMATS berlaku. Jika memungkinkan bagi kedua negara untuk mencapai kesepakatan, perjanjian CMATS bisa saja diperpanjang. Jangka waktu yang mencapai hingga 50 tahun sepertinya berdasarkan pada pertimbangan komersial, dan memberikan kepastian kepada perusahaan-perusahaan perminyakan untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber minyak dan gas di ladang minyak tanpa perubahan kepemilikan sampai minyak dan gas habis. Hal ini sejalan dengan jangka waktu Perjanjian Laut Timor dan Pejanjian Celah Timor sebelumnya, serta dengan jangka waktu proyek minyak dan gas.¹¹
3. **Mengesahkan eksploitasi Australia pada wilayah yang disengketakan:** Perjanjian CMATS memasukkan penerimaan Timor-Leste terhadap kegiatan-kegiatan perminyakan yang dilakukan oleh Australia di wilayah ladang minyak yang sebelumnya disengketakan di luar JPDA. Pada pasal 4.2 mengatakan bahwa hukum dalam negeri kedua negara mengatur kegiatan sumber alam di bawah laut dan mengesahkan yang baru berlaku seperti pada 19 Mei 2002 – hari sebelum RDTL menjadi negara

¹⁰ *Buletin La'ó Hamutuk*, Perjanjian CMATS, Vol. 7, No. 1 April 2006 Halaman 9.

<https://www.laohamutuk.org/Bulletin/2006/Apr/LHBv7n1bi.pdf>

¹¹ *Buletin La'ó Hamutuk*, Perjanjian CMATS, Vol. 7, No. 1 April 2006 Halaman 9.

<https://www.laohamutuk.org/Bulletin/2006/Apr/LHBv7n1bi.pdf>

berdaulat.¹² Surat penjelasan kedua Menteri Luar Negeri antara Timor Leste dan Australia menegaskan bahwa Timor-Leste tidak memiliki undang-undang pada hari itu, sementara Australia sudah memiliki undang-undang khusus yang mencakup perjanjiannya dengan Indonesia pada tahun 1972 dan undang-undang perminyakan tahun 1967 dan 1994. Akibatnya, Australia diperbolehkan melanjutkan eksploitasi minyak di kawasan-kawasan tersebut, sementara Timor-Leste meninggalkan tuntutananya.

4. **Distribusi pendapatan Sunrise:** Pasal 5 CMATS mengatakan bahwa pihak-pihak akan berbagi pendapatan hulu dari Kawasan Unit Sunrise secara sama. Setiap negara akan mendapatkan pendapatan sesuai dengan undangundang perpajakannya dan IUA 2003 (yang memberikan 18% Sunrise kepada Timor-Leste dan 82% kepada Australia), dan kemudian Australia akan membayar Timor-Leste sehingga setiap negara mendapatkan jumlah yang sama. Misalnya, jika Australia mendapatkan \$ 82 juta dan Timor-Leste \$ 18 juta dalam satu kuartal tertentu, Australia kemudian akan membayar Timor-Leste \$32 juta sehingga setiap negara akhirnya mendapatkan \$ 50 juta. Pendapatan yang dibahas dalam Pasal 5 adalah dari “eksploitasi hulu” – yaitu, nilai minyak dan gas pada titik valuasi ketika keluar dari sumur, sebelum memasuki pipa atau kapal. Pasal 6 dan Lampiran memberikan rincian mengenai bagaimana pembagian pendapatan ini dilaksanakan, dan satu mekanisme untuk menyelesaikan perbedaan antara kedua negara.
5. **Hak menangkap ikan:** Pasal 8.1(b), bersama dengan Lampiran II, membagi sumber alam kolom air (mencakup ikan) antara kedua negara sepanjang tepi selatan JPDA, membolehkan nelayan Timor-Leste untuk bekerja di dalam JPDA, dengan syarat bahwa

¹² Ibid., hal 10

kegiatan mereka tidak menghambat kegiatan-kegiatan perminyakan. Perjanjian ini tidak menyebutkan hak menangkap ikan di kawasankawasan lateral di sebelah timur dan barat JPDA yang sebelumnya disengketakan. Pada tahun 1997, Australia menandatangani satu perjanjian yang memberikan Indonesia hak kolom air di kawasan-kawasan ini, tetapi ini belum pernah diratifikasi, yang menimbulkan ambiguitas yang sekarang ini. Timor-Leste dan Indonesia belum merundingkan hak kolom air di lepas pantai utara, timur, dan selatan Timor-Leste. Perundingan ini juga bisa menyelesaikan persoalan dengan Australia, jika Australia melanjutkan menerima perbatasan kolom air yang disepakatinya dengan Indonesia pada tahun 1997.

6. **Komisi Kelautan:** Pasal 19 CMATS menciptakan Komisi ini, dengan satu orang diangkat oleh setiap negara. Komisi ini mengadakan rapat sekali setiap tahun untuk meninjau status ketentuan perbatasan laut (tetapi tidak mengubahnya), dan berkonsultasi mengenai keamanan, lingkungan, pengelolaan sumber alam, dan masalahmasalah lain. Mandatnya mencakup sumber alam yang bisa diperbaharui (ikan) dan tidak bisa diperbaharui (minyak dan gas), serta promosi strategi-strategi pengelolaan yang berkelanjutan. Komisi Kelautan tidak punya wewenang mengenai eksplorasi dan eksploitasi minyak dari Greater Sunrise. Keputusan-keputusan mengenai ini diberikan kepada Komisi Sunrise yang dibentuk berdasarkan Pasal 9.2 Kesepakatan Penyatuan Internasional Sunrise. Komisi Sunrise, yang beranggotakan dua orang Australia dan satu orang Timor-Leste, mengkoordinasikan kerja “otoritas pengaturan” di IUA – yaitu, pemerintah Australia dan Otoritas Mengenai Laut Timor (TSDA). Jika ada ketidaksepakatan yang tidak bisa diselesaikan oleh otorita pengaturan atau Komisi Sunrise, masalahnya

bisa diajukan ke arbitrase berdasarkan Pasal 26.2 dan Lampiran IV IUA.